

**PERAN POSBAKUM TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM MASYARAKAT MISKIN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Aziz Setiawan

NPM. 1621020484

Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PERAN POSBAKUM TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM MASYARAKAT MISKIN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Frenki, M.Si.

Pembimbing II : Dharmayani, SHI., M.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Posbakum disediakan untuk setiap orang yang tidak mampu membayar jasa advokat. Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara. Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Posbakum yang mengemban tugas memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat tersebut mulai ada sejak awal tahun 2011. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum, dalam hal konsultasi hukum dan bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan.

Rumusan masalah penelitian ini (1) Bagaimana peran Posbakum bagi masyarakat miskin dan pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberi bantuan terhadap masyarakat miskin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Peran Posbakum dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi, pembatasan pemberian layanan hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan dan kegunaan Posbakum itu sendiri. Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang berperan dalam memberikan bantuan hukum

terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan, Posbakum pada Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam. Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong, sehingga dengan adanya peran Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memberi bantuan pada masyarakat miskin, telah mencerminkan bahwa Posbakum telah melaksanakan perannya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa :

Nama : Aziz Setiawan
TTL : Bandar Jaya, 3 April 1998
NPM : 1621020484
Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Peran Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 April 2021



Aziz Setiawan
1621020484



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Tlp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Kami tim pembimbing telah melakukan bimbingan dan koreksi sebagaimana mestinya, terhadap skripsi saudara :

Nama : Aziz Setiawan
NPM : 1621020484
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
Judul : Peran Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang).

MENYETUJUI

**untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017

Pembimbing II

Dharmayani, SHI., M.Sy.

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



PENGESAHAN

TIM DEWAN PENGUJI

Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy. (.....)



Dr. H. K. Hurrudin, M.H.
NIR.156210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah[5]: 2)



PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Sabar dan Ibunda tersayang Suyanti, yang telah membesarkan serta senantiasa selalu mendidik, mendoakan dan memberi dukungan dengan segenap kasih sayang. Sehingga dari doa dan dukungan beliau penulis semakin yakin bahwa ridha Allah SWT adalah ridhanya ayah dan bunda.
2. Adikku tersayang Hafid Triawan yang selalu mendukung dalam proses panjang pengerjaan skripsi ini, terima kasih selalu memberikan semangat selama proses belajar ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Aziz Setiawan, merupakan anak pertama dari pasangan bapak Sabar dan ibu Suyanti yang dilahirkan di Bandar Jaya, 3 April 1998 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Penulis memasuki Pendidikan dimulai dari :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi lulus pada tahun 2004. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 3 Bandar Jaya, lulus pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Terbanggi Besar, lulus pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMKN 1 Seputih Agung, lulus pada tahun 2016.
4. Pada September 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan menyelesaikan studi Strata Satu Hukum Tata Negara Pada Tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung,
Penulis,

Aziz Setiawan
1621020484

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat- Nya yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”.

Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu baik dalam bimbingan dan saran yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukti, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Frenki, M.Si., dan Dharmayani, SHI., M.Sy., masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan saran, bimbingan dan arahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas Syari'ah dan institusi yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempat menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Bandar Lampung,
Penulis,

Aziz Setiawan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Fiqh Siyasah.....	13
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	13
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	14
B. Teori Bantuan Hukum	14
C. Siyasah Qadha'iyah (Peradilan)	16
D. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum.....	19
E. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Para Ahli	21
F. Dasar Hukum tentang Posbakum.....	21
1. Dasar Hukum Islam tentang Posbakum	24
G. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum.....	26
1. Bantuan Hukum Pra Kemerdekaan	26
2. Bantuan Hukum Pasca Kemerdekaan	27

3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum	30
4. Subjek dan Unsur Bantuan Hukum	33
5. Pemberian dan Cara Memberi Bantuan Hukum.....	36
H. Tinjauan Pustaka	38

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambar Umum Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang	41
1. Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang	41
3. Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang	43
4.Syarat dan Mekanisme Permohonan Layanan Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	46
5. Struktur Organisasi	49
B. Pelaksanaan Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjung Karang	51

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Posbakum Terhadap Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	57
B. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Peran Posbakum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Tanjung Karang	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

Peran Posbakum di dalam ruang lingkup Pengadilan merupakan layanan bantuan hukum berupa pemberian bantuan informasi, konsultasi, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan di Pengadilan yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum.¹

Pemberian bantuan hukum masyarakat miskin merupakan upaya persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrumen internasional, yakni *Universal Declaration of Human Right*. Menjamin persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.²

Perspektif hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam merupakan segala ketentuan Allah mengenai segala perbuatan hamba yang harus dijalani, diikuti, dipatuhi dan ditaati

¹Ismayana, *Peran Posbakum dalam Melayani Keadilan Masyarakat*, Jurnal

²Frans Hedra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 54.

serta mempunyai sanksi hukum bagi siapa saja yang menyalahinya.³ Dengan demikian hukum Islam itu adalah sekumpulan ketetapan hukum kemashlataan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber al-Quran dan sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.⁴

Peran Posbakum dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum. Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang berperan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan, Posbakum pada Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:

1. Alasan Obyektif

Berdasarkan praktiknya peran posbakum belum terlalu terlihat sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan posbakum itu sendiri, terlebih bagi masyarakat miskin mereka cenderung pasrah ketika terjerat kasus hukum karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak mampu membayar advokat/pengacara untuk menadampingi mereka.

2. Alasan Subjektif

³Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam* (Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2015), h. 10.

⁴*Ibid*, h. 11.

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian, dan memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang ditempuh peneliti, yaitu prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
- b. Daerah penelitian sangat mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori (buku-buku) atau data lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan hukum kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) melalui pandangan Aristoteles yang merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁵ Tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Ciri-ciri negara hukum yaitu *pertama*, adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan, *kedua*, adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan apapun juga, *ketiga*, legalitas dalam arti segala bentuknya.⁶ Perihal bantuan hukum dan hak asasi manusia merupakan elemen yang sangat prinsipal dalam suatu negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*).⁷

⁵Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sitem Hukum Nasional, cet ke-1* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.1.

⁶*Ibid*, h. 2.

⁷*Ibid*, h. 2.

Sementara dalam perspektif hukum Islam negara hukum adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.⁸

Riwayat lain Rasulullah bersabda tentang menolong orang yang sedang dalam kesulitan atau mengalami suatu permasalahan:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ اخِيهِ ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (Bahkan ia wajib menolong dan membelanya). Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat dan barangsiapa menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya pada hari kiamat.(HR. Bukhari: 2422 dan 6951).

Posbakum sebagai salah satu penyedia layanan hukum bagi masyarakat miskin, seharusnya mampu menjalankan pelayanan hukum atau bantuan hukum terhadap masyarakat

⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h.10.

miskin, sehingga mereka tahu bahwa mereka juga berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dengan seadil adilnya.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan peneletian lebih lanjut tentang peran posbakum bagi masyarakat miskin, dengan menekankan pada prinsip hak asasi manusia HAM dan hukum Islam dimana menolong sesama umat manusia yang sedang dalam kesulitan merupakan kewajiban karena selain melakukan perbuatan amal sholeh kita juga dapat meringankan beban orang lain seperti yang telah diriwayatkan dalam riwayat Rasulullah diatas. Dalam membantu masyarakat miskin yang sedang dalam kesulitan merupakan perbuatan baik pasalnya banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui keberadaan posbakum atau bantuan hukum sehingga mereka pasrah apabila mereka berurusan dengan hukum.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yakni peran pos bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dalam perspektif hukum islam. Fokus penelitian merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Penelitian ini bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Adapun yang menjadi fokus deskripsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran, yaitu tindakan oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini adalah advokat, dosen, maupun mahasiswa hukum
2. Perspektif hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan diatas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Posbakum bagi masyarakat miskin dan pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberi bantuan terhadap masyarakat miskin.

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap peran Posbakum terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dalam perspektif hukum Islam studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang peran Posbakum. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang peran Posbakum.
2. Secara praktis, memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu ketatanegaraan.

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.⁹ Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁰ Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku bantuan hukum dan advokasi dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹¹ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang peran Posbakum terhadap pemberian bantuan hukum masyarakat miskin dalam perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 2.

¹⁰Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

¹¹Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 44.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari petugas Posbakum, sementara menurut Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal atau skripsi, sementara menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹³ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.¹⁴ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹⁵ Peneliti memperoleh data dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu petugas Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

¹²Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38.

¹³*Ibid*, h. 40.

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*.....h. 105.

¹⁵ Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif, cet ke-5*(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 118.

b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶ Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey.¹⁷ Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah petugas rutin Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data yang tidak langsung di rujuk kepada subjek peneliti namun melalui dokumen.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen tertulis masyarakat miskin.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang dapat diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁹ Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah petugas Posbakum yang berjumlah 13. Adapun populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja.

b. Sampel

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 83.

¹⁷Mastri Sangarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995), h.192.

¹⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian.....*,h.170.

¹⁹*Ibid*, h.120.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²⁰ Memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah dipecahkan dari jumlah populasi yang ada. Penulis akan mengidentifikasi keseluruhan populasi yang mewakili jumlah populasi yang ada yaitu berjumlah 4 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan advokat piket Posbakum setelah itu penulis akan menjadikan sampel pada petugas Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang.

6. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya:

- a. *Editing*, yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan editing yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.
- b. *Sistematizing*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

7. Metode Analisa Data

Data yang di peroleh dan yang telah di kumpulkan melalui alat pengumpulan data tersebut, selanjutnya akan

²⁰*Ibid*, h. 120.

dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²¹ Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.²²



²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian.....*, h. 5.

²² *Ibid*, h. 4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Dari dua kata berbahasa Arab fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang sama apa yang dimaksud dengan Fiqh siyasah. Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasah dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan

¹Ibnu Syarif, Mugar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31.

bahwa pengertian Fiqh siyasah atau Fiqh Syar'iyah ialah, ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyr'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al-'Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

B. Teori Bantuan Hukum

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk

pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum,serta hak asasi manusia.² Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.³

Bantuan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia dan,masyarakat baru mengenal dan mendengar pada sekitar tahun 1970-an. Aliran bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Di dunia barat pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri yang istilah yang berbeda yaitu pertama, bantuan hukum dikenal dengan *legal aid*, yang berarti pemberian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau *probono*, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin.⁴

Kedua, *legal assistance*, yang berarti pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu,ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan/atau pengacara yang menggunakan honorarium.⁵

Ketiga, *legal service*, pelayanan hukum yang terkandung makna/tujuan:

1. Menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian Memberi bantuan kepada masyarakat yang operasionalnya jasa bantuan antara rakyat

²Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

³Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*....h. 1.

⁴Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*.....h. 21.

⁵*Ibid*, h. 22.

miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

2. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin.
3. Legal service dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.⁶

C. Siyasah Qadha'iyah (Peradilan)

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qada* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqh, *qada* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁷

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qada* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qada* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. Menurut para ahli fiqh, terminologi syariat dari kata *qada* adalah memutuskan

⁶*Ibid*, h. 22.

⁷ Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*,

(Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas *qada* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.⁸

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qodhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifahakan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan *qadhi* berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para *qadhi* bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para *qadhi* yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan *qadhi*.⁹

Sedangkan tugas dan wewenang *al-qadha* adalah:

⁸ Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*,

(Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

⁹ Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata*

Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018).

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa.
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah.
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot.
- d. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya.
- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah.
- f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah.
- g. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum.
- h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka.
- i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya.
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.¹⁰

¹⁰ Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, (Jurnal Rechts Viding, Volume 6 Nomor 1 April 2017), h.70

D. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Asas dan fungsi bantuan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi:¹¹

1. Keadilan.

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum.

Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menunjung tinggi hukum.

3. Keterbukaan.

Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4. Efisiensi.

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5. Efektivitas.

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6. Akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, h. 4.

- 2) Mewujudkan hak kostitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.¹²

Adapun Adnan Buyung Nasution menyatakan bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat dan budaya. Sementara Todung Mulya Lubis mengatakan bantuan hukum adalah konsep yang mencoba mengaitkan kegiatan bantuan hukum dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi sasarannya tidak lagi sekedar membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, tetapi lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural. Bantuan hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong kearah tercapainya perombakan tatanan sosial, sehingga ada pola hubungan yang lebih adil.¹³

Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappellrti, dari penelitian tersebut ternyata bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.¹⁴

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nonor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, h.4.

¹³YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia edisi 2014*, (Jakarta; YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australia Aid, 2014), h. 417.

¹⁴Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta; LP3ES, 1988), H.4.

Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah jadi sikap kedermawanan (*charity*) untuk membantu kaum miskin.¹⁵ Selain itu, dalam *lawasia conference III* (1973), terdapat 3 fungsi bantuan hukum yaitu sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan terhadap apaa yang menjadi haknya, memberi informasi agar timbul kesadaran masyarakat, serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan.

E. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Para Ahli

- a. Menurut H.M.A. KUFFAL “bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Menurut Arif Sidharta “bantuan hukum adalah hal pemberian pelayanan jasa-jasa tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli dalam situasi-situasi problematis dan atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis.

F. Dasar Hukum tentang Posbakum

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

¹⁵ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia edisi 2014*, h. 462.

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28h

- (1) bahwa tiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.¹⁶

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57

- (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat

¹⁶Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22
- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
 - (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸
- d. Intruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma Pasal 1 ayat (3) Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
- f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

¹⁷Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸Undang-undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Advokat.

1. Dasar Hukum Islam tentang Posbakum

Posbakum adalah pos bantuan hukum yang ada di ruang lingkup pengadilan yang bertujuan untuk membantu golongan tidak mampu dalam bidang hukum secara cuma-cuma (prodeo).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. – (Q.S Al-Maidah: 2).

Tolong menolong pada terjemahan ayat diatas ialah membantu manusia dalam kesulitan, karna sebaik-baiknya manusia ialah membantu agar yang dalam kesulitan bisa terhindar dari kesulitan tersebut.

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي ۖ بَشُرُهُ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ

رَدْمًا ﴿٩٥﴾

Artinya: Dia (Zulkarnain) berkata, “Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik (daripada imbalanmu), maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. – (Q.S Al-Kahfi: 95).

Berdasarkan ayat alquran yang ada diatas tentang tolong menolong yang semoga semakin menumbuhkan rasa solidaritas kita kepada sesama, terutama kepada sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Mudah-mudahan Allah

senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi muslim yang memiliki kepedulian terhadap sesama. Allah swt berfirman dalam surat An:Nisa/4:135

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ

عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ

فَقِيرًا فَلِلّٰهِ أُولَىٰ ۖ بِمَا ءَمَرُوا أَتَّبِعُوهُ أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلَوُّوْا

أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. . – (Q.S An:Nisa/4:135).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan bagi setiap orang yang beriman harus menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena-Nya. Di antara bentuk penegakan keadilan tersebut adalah bersikap adil dalam memberikan bantuan hukum dengan tidak adanya diskriminasi apapun terhadap terdakwa atau bagi setiap orang yang berperkara di pengadilan yang tergolong kaya maupun miskin semuanya harus diperlakukan sama.

G. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum Pra-Kemerdekaan.

Bantuan hukum pada zaman penjajahan Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, akan tetapi Belanda menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, pihak kompeni (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal. Hal yang tidak mereka hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber pokok hukum lokal. Hubungan yang serupa juga terdapat di bidang peradilan dengan perbedaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk tingkat pertama, Raad van justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (Hooggerechtshof). Negara Eropa mempunyai dua kitab undang-undang hukum acara, satu untuk perkara perdata (Burgelijk Rechtsvordering) dan untuk perkara pidana (Strafvordering). Dan tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi yang termaktub dalam kitab undang-undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan dalam kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yaitu: *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R.)*. Dalam masa pendudukan Jepang, terhadap golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgerlijk Verboek (B.W.)* dan *Wetboek van Koophandel (W.v.K.)*, sedang untuk golongan Indonesia asli berlaku hukum adat.

Selanjutnya bagi golongan-golongan lainnya berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturan dahulu. Organisasi peradilan pada masa pemerintah pendudukan Jepang tidak menunjukkan adanya suatu kesatuan. Ada 5 (lima) lingkungan peradilan yang dikenal pada waktu itu, yaitu Gunritukaigi (Mahkamah Militer), Gunsei Hooiin (Pengadilan Pemerintah Balatentara), Tihoo Hooiin (Pengadilan Negeri), Kootoo Hooiin (Pengadilan Tinggi), Saikoo Hooiin (Pengadilan

Agung) dan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.¹⁹ Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol Inggris dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi *professional responsibility* (tanggungjawab profesi). Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi, tetapi juga non litigasi.²⁰

2. Bantuan Hukum Pasca Kemerdekaan

Sejak Indonesia merdeka, pemerintahan RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 1 tahun 1946.

Pada tahun 1946, pemerintah RI mengeluarkan UU No 1 tahun 1946, tentang peraturan Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

- b) Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 9 mei 1950, mengatur tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk mengawasi

¹⁹Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*,

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), h. 7.

²⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,

(Jakarta : Kencana, 2006), h. 67.

jalannya peradilan. Dan dalam Pasal 42 terdapat istilah yang menerangkan “pemberi bantuan hukum” dengan kata “Pembela”.

c) Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951

Undang-undang ini mengatur mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-undang darurat ini menentukan kembali berlakunya HIR dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil.

d) Herziene Inlandsch Reglement

Dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban advokat dan pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam beberapa pasal HIR, seperti: Pasal 83 h ayat 6, Pasal 120 Rsv, Pasal 250 ayat 5 HIR, Pasal 254 ayat 1 HIR, Pasal 123 HIR. Undang-undang No.19 Tahun 1946 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya seseorang yang terkejar masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang ahli hukum.²¹

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau advokat dilakukan oleh Mauro Cippelleti, yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution yang mengatakan bahwa: “Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Juga ternyata bahwa pada tiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku”. Pada tahun 1892 di kota Amsterdam dibentuk suatu biro bantuan hukum dari organisasi Toynbee, yang bernama *Ons Huis*. Biro-biro tersebut juga dibentuk di kota Leiden dan Den Hag. Biro tersebut memberikan konsultasi hukum dengan biaya yang sangat rendah. Pada tahun 1905 kota Keulen Jerman didirikan biro konsultasi hukum yang pertama dengan nama *Rechtsaus*

²¹Frans Hendra Winarta.....h. 16-22.

Kunststube Fur Minderbemittelten dengan mendapat subsidi dari kotapraja. Di Amerika Serikat juga dibentuk organisasi bantuan hukum swasta pada tahun 1876, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan imigran Jerman, yang bernama *Deutsche Rechtsschutz Verein*.

Pemberian advokat khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat dikatakan relatif baru di negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Menurut Ali Yusuf Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik didalam maupun di luar Pengadilan.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto menjelaskan bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara Cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak Pelita ke III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum. Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka firman raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundang-undangan di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijk Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia*) yang disingkat dengan nama R.O.Stb. 1847 Nomor 23 Jo Stb. 1848 Nomor 57 dengan segala rubahan dan tambahannya.²²

²² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, hlm 12-14.

3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot bantuan hukum dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

1. Bantuan hukum preventif adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Bantuan hukum diagnostik adalah bantuan hukum yang dilaksanakan dengan pemberian nasihat-nasihat hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik adalah bantuan yang lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkrit yang terjadi di masyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa jasa advokat.
4. Bantuan hukum pembentukan hukum adalah bantuan hukum yang dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.
5. Bantuan hukum pembaruan hukum adalah bantuan hukum yang lebih ditujukan bagi pembaruan hukum. Baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam tiga macam, yaitu konsep bantuan hukum tradisional, bantuan hukum konstitusional dan bantuan hukum struktural. *Pertama*, konsep bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Konsep ini

merupakan konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelitbelit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan oleh besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Walaupun disamping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini, T. Mulya Lubis menyatakan bahwa pendekatan advokat bercirikan: 1) individual, 2) urban(perkotaan), 3) pasif, 4) legalistik, 5) gerakan hukum (*legal movement*), 6) persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution of servis*) sedangkan pendekatan seorang pembela umum (*aktivis legal aid*) adalah 1) struktural (kolektif), 2) urban-rural, 3) aktif, 4) orientasi legal dan non-legal, 5) gerakan sosial (*social movement*), 6) perubahan sosial.²³

Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun prinsip persamaan dihadapan hukum dan pernyataan bahwa indonesia adalah negara hukum menunjukan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (3)

²³Benziad Kadafi dkk, *Advokat Indonesia Mencari Mencari Legitimasi cet ke-3*, (Jakarta Pusat: PSHK, 2002), h. 165.

perubahan ketiga undang-undang (UUD)1945, Pasal 27 UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Ketiga, konsep bantuan hukum struktural. Adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.²⁴

Lebih jauh menurut Achmad Santosa, seorang aktivis bantuan hukum struktural di Jakarta, bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu:

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong dengan persetujuan klien tentunya untuk pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.
3. Melancarkan aktivitas *policy reform* dengan mengertikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

²⁴Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), h. 77.

4. Subjek dan Unsur Bantuan Hukum

Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk negara republik indonesia yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Dalam negara hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Moh. Yamin mendefinisikan bahwa negara hukum adalah kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang, atau kepercayaan bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara.²⁵ Bantuan hukum di dalam negara hukum merupakan sebagian sarana menegakkan hukum itu sendiri, terutama untuk memperoleh kebenaran dan keadilan, dimana akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di Pengadilan.

Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilanlah yang menyebabkan dapat berperannya bantuan hukum secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dengan dan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkanya, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum yang lazim disebut hukum acara. Sehubungan dengan bantuan hukum, maka ada empat subjek yang dapat menerima kuasa untuk beracara dalam persidangan, yaitu:

- a. Advokat atau *Procureur* adalah penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum, diangkat secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan Mahkamah Agung dan bukan pegawai negeri, dengan wilayah praktik beracaranya sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM tersebut, telah ditetapkan tempat kedudukannya dan domisilinya

²⁵Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 22.

pada suatu kotatertentu di dalam wilayah Pengadilan Negeri.

- 2) Peran advokat tersebut ijin operasionalnya di semua lingkungan pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.
 - 3) Upaya penerbitan administrasi pengawasan dan pembinaan terhadap advokat, maka ketika beracara di muka pengadilan diluar daerah hukum Pengadilan Tinggi dimana ia berdomisili, maka advokat tersebut wajib melaporkan kepada ketua Pengadilan Tinggi secara tertulis dengan menyampaikan tembusan kepada: a) Mahkamah Agung RI, b) Ketua Pengadilan Tinggi/Agama/Tata Usaha Negara yang dituju, c) Pengadilan Tinggi Negeri tempat domisili, dan d) pengadilan Agama/Pengadilan Tata Usaha Negara yang dituju.
- b. Pengacara praktik adalah penasihat hukum resmi atau pembela umum (public defender) dengan gelar sarjana hukum yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehukuman No. 1 Tahun 1975, setelah dinyatakan lulus ujian, dengan wilayah praktik beracaranya sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, mereka dapat membuka kantor atas nama mereka sendiri di wilayah Pengadilan Tinggi tempat mereka diberi izin melakukan pekerjaan sebagai pengacara atau penasihat hukum.
 - 2) Pengacara praktik tersebut dapat melakukan beracara di semua lingkungan peradilan, baik peradilan umum, agama tata usaha negara, maupun lainnya di wilayah kekuasaan Pengadilan Tinggi tersebut.
 - 3) Untuk penertiban administrasi pengawasan dan pembinaan, ketika pengacara praktik tersebut beracara di muka pengadilan di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tempat domisilinya, maka ia wajib melaporkan

secara tertulis dan menyampaikan tembusannya kepada:

a) Mahkamah Agung RI, b) Ketua Pengadilan Tinggi tempat domisilinya, c) Ketua Pengadilan Negeri tempat domisilinya, dan d) Ketua Pengadilan di luar Pengadilan Negeri yang dituju.

- c. Lembaga Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum. LBH Fakultas Hukum atau Syari'ah dapat memberikan bantuan hukum di muka pengadilan di daerah hukum pengadilan, dimana LBH tersebut terdaftar. Apabila berpraktek di luar wilayah Pengadilan Negeri namun masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi tempat kedudukannya, maka ia harus mendapat ijin praktiknya dan menyampaikan ijin praktik tersebut kepada: a) Ketua Pengadilan Tinggi di luar Pengadilan Tinggi Umum, b) Ketua Pengadilan Negeri tempat terdaftar, dan c) Ketua Pengadilan di luar Pengadilan Negeri yang dituju.

- d. Perwira Hukum TNI-POLRI. Dapat melakukan praktik di muka pengadilan di seluruh wilayah KODAM, POLDA dan sebagainya atas ijin Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri. Kuasa insidentil adalah kuasa hukum yang diminta oleh seseorang yang berperkara untuk memberikan bantuan atau nasihat hukum selama perkara berjalan, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak harus sarjana hukum/sayari'ah, sekaligus dalam melakukan bantuan hukum atau jasa hukum tersebut tidak sebagai profesi.
- 2) Cukup memperoleh ijin Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum dimana yang bersangkutan diminta untuk memberikan bantuan hukum, untuk satu tahun satu perkara saja.
- 3) Tidak diperlukan memiliki ijin praktik dari Ketua Pengadilan Tinggi, akan tetapi wajib melaporkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama tersebut secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, dan tembusannya

dikirimkan kepada: a) Ketua Penagilan Tinggi yang dituju di luar Pengadilan Tinggi Umum, b) Ketua Pengadilan Negeri, dan c) Ketua Pengadilan yang dituju.²⁶ Unsur-unsurnya adalah adanya jasa hukum, tindakan pembela artinya orang yang berwenang bertindak membela suatu perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.²⁷

5. Pemberian dan Cara Memberi Bantuan Hukum

Mekanisme pemberian bantuan hukum umumnya yang dipilih oleh kalangan pejabat peradilan adalah melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang merupakan proyek Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bekerja sama dengan beberapa organisasi advokat karena penggunaan dananya harus dipertanggungjawabkan dalam anggaran Departemen Kehakiman dan HAM RI.²⁸

Seorang pengacara terkemuka S. Tarif pernah menyatakan, “Bahwa orang-orang yang dapat diberi bantuan/ nasihat hukum oleh LBH Jakarta ini hanyalah orang-orang miskin (yang harus memiliki surat keterangan miskin/ tidak mampu dari lurah atau pejabat lainnya yang) dan tidak diperkenankan untuk memberi bantuan/ nasihat. hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium kepada seorang advokat/ pengacara biasa. Demikian juga petugas-petugas LBH tidak diperkenankan memengut honorarium dari orang-orang yang kepentingannya dibela oleh LBH Jakarta.”

²⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan*

Mahkamah Syari'ah di Indonesia, (Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 99-

103.

²⁷ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 199.

²⁸Binziad Kadafi, dkk.....h. 173.

Pengacara terkemuka lainnya yaitu Adnan Buyung Nasution berpendapat sebagai berikut:

1. Bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah si miskin. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara yang berkembang bahkan di negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.
2. Buta hukum adalah suatu istilah yang diajukan pertama kalinya dalam Kongres ke-III PERADIN di Jakarta. Maksudnya adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.

Dengan menelaah kedua pendapat tersebut diatas dapat ditarik, bahwa penerima bantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu (secara sosial-ekonomi-politis) maupun yang buta hukum. Walaupun sudah ditegaskan maksudnya, akan tetapi pengertian buta hukum tidaklah selalu identik dengan mereka yang kurang mampu.²⁹ Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum adalah:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurangkurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok.
- b. Persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- c. Mengajukan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala

²⁹Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Gl. 1983), h. 26.

desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran B menjelaskan bahwa syarat memperoleh bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum adalah:

- a) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- b) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Hukum Langsung Tunai (BLT). Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh ketua Pengadilan Agama.

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Nuriasmin Rahmadany Suneth, tahun penelitian 2016 dengan judul Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun hasil penelitiannya adalah peran dari Posbakum di Pengadilan Negeri Sungguminasa berawal pada pemberian informasi bagi mereka yang datang kepada Posbakum dan berakhir pada pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan untuk beracara tanpa sampai masuk ke ruang sidang. Dikarenakan jasa yang diberikan oleh Posbakum bukanlah jasa advis atau advokasi

secara menyeluruh, tapi hanya jasa advokasi berupa gambaran hal yang akan dilakukan bagi para pihak yang hendak berperkara di pengadilan dan jasa pembuatan surat permohonan maupun surat gugatan yang nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai salah satu syarat beracara baik ia sebagai penggugat/tergugat maupun pemohon/termohon.

Persamaan antara penelitian Nuriasmin dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran dari POSBAKUM. Sedangkan perbedaannya adalah, penulis menggunakan perspektif hukum islam sedangkan Nuriasmin tidak menggunakan perspektif hukum islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Hardiansyah, tahun penelitian 2016 dengan judul Kedudukan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) LBH SEJAHTERA dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Pidana menggunakan metode penelitian deskriptif, adapun hasil penelitiannya adalah Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam memberikan bantuan hukum pemeriksaan perkara pidana hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera tidak bisa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma lagi dan apabila orang tersebut masih ingin menggunakan jasa dari Pos Bantuan Hukum LBH Sejahtera dalam bentuk pendampingan di persidangan maka harus ada surat kuasa dan harus mengeluarkan dana

Persamaannya antara penelitian Febri dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang Pos Bantuan Hukum. Sedangkan perbedaannya, penulis membahas peran dari Pos Bantuan Hukum sedangkan Febri membahas Kedudukan dari Pos Bantuan Hukum..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kadafi, Benziad dkk, *Advokat Indonesia Mencari Mencari Legitimas*. Jakarta Pusat: PSHK, 2002.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syaria'ah di Indonesia*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008.
- Narbuko, Cholida, Achmad, Abu, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Sangarimbun, Mstiri, dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: GI. 1983.
- Solihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*. Bandar Lampung: Kreasi Total Media, 2015.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, cet ke-5*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syarif, Ibnu dkk, *Fiqih Siyash. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Winarta, Frans Hedra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.

—————, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Wlas, Lasdin, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Yahman, Tarigan, Nurtin, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, cet ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia edisi 2014*, Jakarta: YLBHI, Yayasan Obor Indonesia dan Australia Aid, 2014.

JURNAL

Aziz, Saiful, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016.

Ismayana, *Peran Posbakam dalam Menayani Keadilan Masyarakat*, Jurnal Hukum Unswagati, 2015.

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No. 73, Jakarta: PPHIMM, 2011.

Rumadan, Ismail, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum*

dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian, Jurnal Rechts Viding, Volume 6 Nomor 1, 2017.

Rusdin, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata*

Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018.

Winarta, Frans Hendra, “Probono Publico: *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*”.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

WAWANCARA

Hendra Saputra, wawancara dengan penulis, Advokat Picket Posbakum, Bandar Lampung, 25 Desember 2020.

Hendrico Tanjung, wawancara dengan penulis, Ketua Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2020, 24 Desember 2020.

Romi Handoko, wawancara dengan penulis, Sekretaris Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2020, Bandar Lampung, 22 Desember 2020.

Wahda Mainuddin Syifa, wawancara dengan penulis, Bendahara Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2020, Bandar Lampung, 22 Desember 2020.

ON-LINE

Pengadilan Agama Tanjung Karang, pa-tanjungkarang.go.id (03 Desember 2020).